

**PENGARUH KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025**

Dennis Permadi Eka Prasetya¹, Rafika Meilia Sari²

^{1,2} UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung

Informasi Artikel

Riwayat naskah:

Diterima : 27 April 2026

Disetujui : 20 Mei 2026

Publikasi : 31 Mei 2026

Penulis Korespondensi:

Dennis Permadi Eka Prasetya

dennispermadiepakprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketidaksetaraan gender memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan dukungan studi literatur serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan regresi linier sederhana menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gender berpengaruh signifikan terhadap TPAK, dengan nilai t-hitung sebesar -2,714 dan signifikansi 0,010 ($< 0,05$). Nilai R Square sebesar 0,170 mengindikasikan bahwa gender menjelaskan sekitar 17,0% variasi dalam TPAK, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan data TPAK tahun 2025 juga memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai faktor seperti akses pendidikan, budaya patriarki yang masih kuat, kesempatan kerja, serta kebijakan ketenagakerjaan yang ada. Dengan demikian, ketimpangan gender masih menjadi salah satu determinan penting yang memengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Ketidaksetaraan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kebijakan Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of gender inequality on the Labor Force Participation Rate (LFPR) in East Java Province in 2025. The research adopts a quantitative approach supported by a literature review and secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The data were analyzed using descriptive statistics, hypothesis testing, and simple linear regression with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results indicate that the gender variable has a statistically significant effect on LFPR, with a t-value of -2.714 and a significance level of 0.010 (< 0.05). The R Square value of 0.170 suggests that gender accounts for 17.0% of the variation in LFPR, while the remaining percentage is influenced by other factors beyond the scope of this study. The 2025 LFPR data also reveal a consistent pattern across districts and cities in East Java, where male labor force participation remains higher than that of females. This gap is influenced by several factors, including educational attainment, persistent patriarchal norms, employment opportunities, and existing labor policies. Overall, gender inequality continues to be a key determinant affecting women's participation in the labor market in East Java Province.

Keywords : Gender Inequality, Labor Force Participation Rate, Labor Policy

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja telah menjadi isu pembangunan yang mendapat perhatian luas dalam kajian ekonomi modern karena berkaitan erat dengan produktivitas, distribusi pendapatan, dan keberlanjutan pembangunan sosial. Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal masih umum terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia,

meskipun akses perempuan terhadap pendidikan meningkat selama beberapa dekade terakhir. Berbagai studi mengungkap bahwa perempuan masih bergulat dengan hambatan struktural di dunia kerja, termasuk kesenjangan upah, akses terbatas ke pekerjaan formal, dan beban domestik yang berat. Kondisi ini pun membentuk keputusan perempuan untuk terlibat di pasar kerja (Nursyamsiah et al., 2025). Isu gender di sektor ketenagakerjaan tak hanya soal sosial, tapi juga merusak efisiensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, memperkuat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja jadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. Karenanya, kita perlu teliti mengkaji kaitan antara kesenjangan gender dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kompleksitas hubungan antara ketidaksetaraan gender dan partisipasi angkatan kerja telah melahirkan berbagai pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan dinamika tersebut. Salah satu *grand theory* yang banyak digunakan dalam kajian ketenagakerjaan gender adalah *Gary Becker* melalui *Human Capital Theory* yang menjelaskan bahwa partisipasi kerja dipengaruhi oleh investasi pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan kesehatan individu. Dalam perspektif tersebut, perempuan dengan tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang baik semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang di pasar kerja. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas modal manusia perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akses terhadap pekerjaan formal maupun pendapatan yang setara (Hanoum & Imelda, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan non-ekonomi yang turut memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perspektif ini kemudian berkembang melalui *Gender Stratification Theory* yang menjelaskan bahwa struktur sosial patriarkal menciptakan pembagian peran berbasis gender sehingga perempuan cenderung ditempatkan pada sektor domestik dan pekerjaan informal (Ernada et al., 2026). Selain itu, *Feminist Economic Theory* menegaskan bahwa pekerjaan domestik perempuan sering kali tidak dikategorikan sebagai aktivitas produktif, sehingga perempuan menghadapi beban ganda antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pasar (Harianto & Listyani, 2025). Sementara itu, *Labor Market Segmentation Theory* menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja terbagi ke dalam sektor primer dan sekunder, di mana perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor informal dengan tingkat upah dan perlindungan kerja yang relatif rendah (Buchori et al., 2024). Perkembangan berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan institusional.

Berbagai penelitian empiris pada tingkat internasional menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender memiliki hubungan erat dengan peningkatan partisipasi kerja perempuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Menurut Colonna et al. (2025), negara yang mampu mengurangi kesenjangan gender di sektor ekonomi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata serta tingkat kesejahteraan rumah tangga yang lebih stabil. Di sisi lain, penelitian Harianto dan Listyani (2025) menunjukkan bahwa perempuan di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja formal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar perempuan bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan perlindungan kerja yang minim. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa peningkatan pendidikan perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi kerja akibat masih kuatnya budaya patriarkal dan pembagian kerja domestik (Dwipayanti et al., 2025). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sangat bergantung pada konteks sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah. Dengan kata lain, kondisi

daerah menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana kesenjangan gender memengaruhi partisipasi kerja.

Di Indonesia, dinamika ketenagakerjaan masih menunjukkan adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan dan menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai data dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TPAK perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun tingkat pendidikan perempuan terus meningkat (Nursyamsiah et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh tersedianya peluang kerja yang setara di pasar tenaga kerja. Selain itu, dominasi sektor informal menyebabkan banyak perempuan bekerja pada pekerjaan dengan tingkat pendapatan rendah, jam kerja tidak pasti, serta minim jaminan sosial (Buchori et al., 2024). Situasi tersebut semakin kompleks ketika perempuan juga dihadapkan pada beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan gender tidak hanya memengaruhi akses perempuan terhadap pekerjaan, tetapi juga memengaruhi kualitas pekerjaan yang diperoleh.

Jawa Timur menonjol sebagai wilayah kunci untuk meneliti hubungan antara ketidaksetaraan gender dan partisipasi angkatan kerja, berkat karakteristik ekonominya yang kuat. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomiannya bergantung pada sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa yang menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Sayangnya, kemajuan sektor-sektor ini belum menghasilkan peluang kerja yang setara bagi perempuan. Penelitian Arodha et al. (2025) menegaskan bahwa perempuan di Jawa Timur memainkan peran krusial dalam aktivitas ekonomi berbasis komunitas dan sektor pertanian, meski mereka masih terbentur berbagai hambatan akses ekonomi serta sosial. Tak hanya itu, perempuan lebih sering terjebak di sektor informal dengan upah lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah ini belum berhasil meredam ketimpangan gender di pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, transformasi ekonomi pascapandemi juga turut mengubah struktur pasar tenaga kerja dan pola partisipasi kerja perempuan di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Perkembangan ekonomi digital, sistem kerja yang semakin fleksibel, serta meningkatnya persaingan tenaga kerja menuntut sumber daya manusia yang lebih adaptif, kompetitif, dan memiliki kualitas yang memadai. Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses pekerjaan layak akibat diskriminasi gender dan rendahnya perlindungan kerja (Hanoum & Imelda, 2025). Dalam situasi tersebut, peningkatan TPAK menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ketimpangan gender yang terus berlangsung berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi serta mengurangi kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Oleh sebab itu, kajian mengenai ketidaksetaraan gender dan TPAK menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.

Perkembangan penelitian mengenai gender dan partisipasi angkatan kerja menunjukkan dominasi penggunaan pendekatan kuantitatif berbasis regresi panel, regresi logistik, dan analisis data makro regional. Sebagian besar penelitian berfokus pada penjelasan hubungan antara pendidikan, tingkat upah, status perkawinan, fertilitas, dan partisipasi kerja perempuan dengan menggunakan pendekatan statistik empiris (Nursyamsiah et al., 2025). Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan sosial dan institusional masih relatif terbatas, terutama pada level regional. Beberapa penelitian juga lebih berfokus pada skala nasional sehingga belum mampu menggambarkan variasi karakteristik sosial ekonomi antarwilayah secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan gender sebagai variabel demografis semata dan

belum banyak mengaitkannya dengan struktur ketimpangan sosial secara lebih mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan penelitian yang lebih kontekstual dan spesifik wilayah.

Dominasi penelitian terdahulu pada tingkat nasional menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjelaskan dinamika ketidaksetaraan gender pada level regional, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada faktor pendidikan, status perkawinan, atau kondisi ekonomi rumah tangga dalam menjelaskan partisipasi kerja perempuan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan indikator ketidaksetaraan gender regional. Padahal, struktur ekonomi dan karakteristik sosial budaya Jawa Timur memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, perubahan struktur tenaga kerja pascapandemi belum banyak dianalisis dalam kaitannya dengan ketimpangan gender dan TPAK perempuan. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan perspektif gender dengan dinamika ekonomi regional secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai ketimpangan gender dan ketenagakerjaan pada tingkat provinsi.

Meningkatnya perhatian terhadap pembangunan yang inklusif dan responsif gender semakin memperkuat pentingnya analisis mengenai hubungan antara ketidaksetaraan gender dan partisipasi angkatan kerja. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mempertimbangkan aspek kesetaraan gender berpotensi memperbesar ketimpangan sosial serta menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Tazkianida (2025), program pemberdayaan perempuan berperan penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender dan penyediaan pekerjaan yang layak. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sangatlah krusial untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

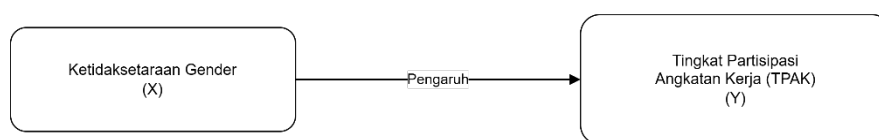
Berdasarkan dari berbagai dinamika teoritis dan temuan empiris yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Kajian ini memandang gender tidak hanya sebagai aspek sosial, tetapi juga sebagai bagian dari struktur ekonomi yang memengaruhi akses serta peluang kerja bagi perempuan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara ketimpangan gender dan dinamika pasar tenaga kerja di tingkat regional. Selain memperkaya kajian ekonomi gender secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar empiris dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap isu gender di Jawa Timur. Upaya seperti peningkatan akses kerja, penguatan kapasitas perempuan, dan perluasan kesempatan ekonomi yang inklusif dinilai penting untuk menekan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, peningkatan TPAK dapat tercapai sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder. Metode studi literatur dilakukan melalui penelaahan, pengkajian, dan sintesis berbagai penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan terkait ketidaksetaraan gender dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Firdha et al., 2021). Kajian teoritis dalam penelitian ini

meliputi *Human Capital Theory*, *Gender Stratification Theory*, *Feminist Economic Theory*, dan *Labor Market Segmentation Theory* yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis hubungan antara ketidaksetaraan gender dan partisipasi kerja perempuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang digunakan meliputi TPAK berdasarkan gender serta berbagai indikator ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics melalui metode regresi linier sederhana guna mengetahui sejauh mana ketidaksetaraan gender memengaruhi TPAK. Melalui kombinasi studi literatur dan analisis kuantitatif, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis yang lebih menyeluruh, tetapi juga menghadirkan bukti empiris yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif di Provinsi Jawa Timur. Model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual

Hasil Dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis

Data analisis diolah menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics, mencakup uji hipotesis sederhana dan koefisien determinasi. Uji hipotesis sederhana ini menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian, sementara koefisien determinasi (R^2) mengukur proporsi variasi variabel Y yang dijelaskan oleh variabel X. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel X berhasil menjelaskan sebagian variasi pada variabel Y, yang berarti variabel X berpengaruh signifikan dan relevan terhadap variabel Y dalam konteks studi ini. Rincian hasil pengujian statistik tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Hipotesis

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	112.559	14.090		7.988	.000
	Gender	-.413	.152	-.412	-2.714	.010

a. Dependent Variable: TPAK

Sumber: Data sekunder diolah, 2026

Keterangan:

Y: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

X: Gender (Laki-laki dan Perempuan)

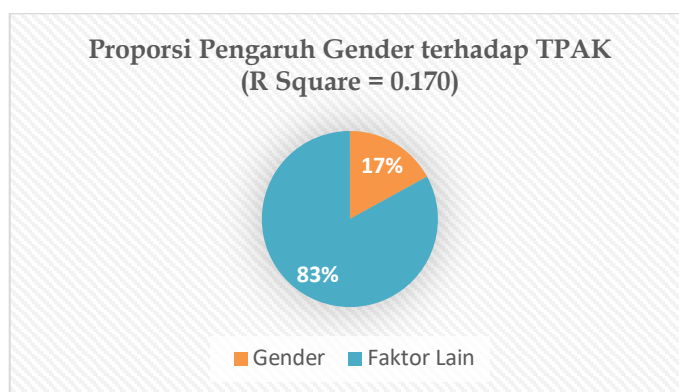
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y sebesar $0,10 > 0,05$ dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi $0,05$ sebesar $1,960$. Kriteria pengujian menyatakan bahwa H_0 diterima apabila $-1,960 < t \text{ hitung} < +1,960$. Namun, hasil analisis SPSS menunjukkan nilai t hitung sebesar $-2,714$, sehingga berada di luar rentang penerimaan H_0 , yaitu $-1,960 < -2,714 < +1,960$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.412 ^a	.170	.147	3.424
a. Predictors: (Constant), Gender				

Sumber: Data sekunder diolah, 2026

Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai *R Square* sebesar $0,170$. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel X (gender) mampu menjelaskan sebesar 17% variasi pada variabel Y (TPAK). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap TPAK. Adapun 83% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai *R Square* sebesar $0,170$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel X (Gender) memberikan pengaruh sebesar 17% terhadap variabel Y (TPAK). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Gender terhadap TPAK. Sementara itu, sebesar 83% variasi pada TPAK dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.



Gambar 2. Proporsi Pengaruh Gender terhadap TPAK

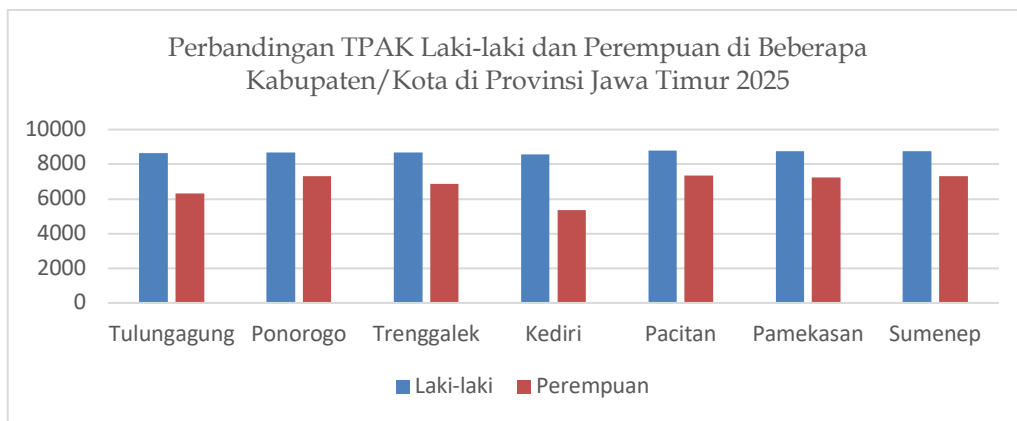
Perbedaan TPAK Laki-laki dan Perempuan Tahun 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Indonesia secara konsisten berada di bawah laki-laki dengan selisih yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, TPAK perempuan juga cenderung stagnan pada kisaran 50% (Sidabutar, 2024). Kondisi serupa terlihat pada data TPAK tahun 2025 di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, di mana partisipasi angkatan kerja laki-laki tetap tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat di Kabupaten Pacitan dengan TPAK laki-laki sebesar 8.806 dan perempuan sebesar 7.355 . Kesenjangan serupa juga ditemukan di Kabupaten Ponorogo (8.669 dan 7.326), Trenggalek (8.661 dan 6.878), serta Tulungagung (8.654 dan 6.302). Bahkan, disparitas yang

PENGARUH KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

lebih besar terlihat di Kabupaten Kediri (8.558 dan 5.355), Lumajang (8.703 dan 5.295), serta Gresik (8.338 dan 5.254). Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pasar kerja masih relatif rendah dibandingkan laki-laki di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Beberapa daerah menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, seperti Kabupaten Pacitan (7.355), Pamekasan (7.244), dan Sumenep (7.294). Perbedaan tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial dan budaya, tingkat pendidikan, serta ketersediaan peluang ekonomi di masing-masing daerah. Secara umum, data tersebut menegaskan bahwa gender masih menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Walaupun partisipasi perempuan di beberapa wilayah cenderung meningkat, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tergolong cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan perluasan akses terhadap kesempatan kerja yang setara agar partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dapat terus meningkat.



Gambar 3. Perbandingan TPAK Laki-laki dan Perempuan di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2025	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pacitan	8806	7355
2	Ponorogo	8669	7326
3	Trenggalek	8661	6878
4	Tulungagung	8654	6302
5	Blitar	8612	6550
6	Kediri	8558	5355
7	Malang	8796	5974
8	Lumajang	8703	5295
9	Jember	8861	6321
10	Banyuwangi	8641	6123
11	Bondowoso	8922	6584
12	Situbondo	8909	6847
13	Probolinggo	8885	6513
14	Pasuruan	8655	6305
15	Sidoarjo	8356	5553
16	Mojokerto	8246	6603

PENGARUH KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGGARAN KERJA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2025	
		Laki-laki	Perempuan
17	Jombang	8643	5877
18	Nganjuk	8595	6043
19	Madiun	8372	6457
20	Magetan	8478	6511
21	Ngawi	8584	6374
22	Bojonegoro	8828	6900
23	Tuban	8722	5873
24	Lamongan	8705	6265
25	Gresik	8338	5254
26	Bangkalan	8285	5560
27	Sampang	8821	6701
28	Pamekasan	8766	7244
29	Sumenep	8768	7294
30	Kota Kediri	8142	5993
31	Kota Blitar	8484	6737
32	Kota Malang	7935	6062
33	Kota Probolinggo	8129	5597
34	Kota Pasuruan	8465	6672
35	Kota Mojokerto	8248	5792
36	Kota Madiun	8039	6259
37	Kota Surabaya	8142	6016
38	Kota Batu	8845	7257

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan, baik di negara maju maupun berkembang. Dalam konteks ketenagakerjaan, gender berpengaruh besar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hingga kebijakan yang membentuk peran perempuan di dunia kerja. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan seharusnya memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecuali pada kondisi biologis tertentu yang memang memerlukan perlakuan berbeda (Sulistiyowati, 2021). Selain itu, faktor ekonomi, khususnya upah minimum, juga memengaruhi TPAK berdasarkan gender. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja karena memberikan insentif finansial yang lebih besar. Namun, kesenjangan upah dan praktik diskriminasi di lingkungan kerja masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara optimal. Oleh karena itu, penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang setara bagi laki-laki dan perempuan menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan TPAK perempuan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berperan krusial dalam membentuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berdasarkan gender. Regulasi ketenagakerjaan yang menekankan kesetaraan seperti upah sama dan perlindungan dari diskriminasi membuka peluang lebih luas bagi perempuan di pasar kerja. Kebijakan keluarga termasuk cuti melahirkan memadai dan cuti ayah juga membantu membagi tugas pengasuhan secara adil antara pria dan wanita. Namun, *The Indonesia Country Gender Assessment (CGA)* tahun 2020 mencatat bahwa meskipun berbagai kebijakan dan program pasar tenaga kerja telah diarahkan untuk meningkatkan daya saing serta penciptaan lapangan kerja, masih terdapat bias gender di dalamnya. Akibatnya, segregasi pekerjaan berbasis gender semakin kuat,

dengan perempuan cenderung terjebak di sektor berproduktivitas dan upah rendah (Program Kesetaraan Gender di Indonesia, 2025). Untuk itu, peningkatan TPAK memerlukan kebijakan yang lebih holistik, meliputi transformasi sektor ketenagakerjaan melalui program yang memperluas peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat reformasi regulasi tenaga kerja, serta mendorong ekspansi kerja secara global (Haryani et al., 2023).

Pendidikan

Kesetaraan gender di bidang pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia secara internasional. Namun, banyak negara masih kesulitan mewujudkannya sepenuhnya. Perempuan sering menghadapi hambatan seperti diskriminasi, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, dan stereotip gender yang membatasi pilihan karir mereka (Septiani et al., 2023). Di sisi lain, penelitian Lestari (2023) menemukan bahwa partisipasi perempuan di angkatan kerja dan tingkat pendidikan mereka berkontribusi positif terhadap pembangunan gender. Ini menegaskan bahwa akses pendidikan setara bukan hanya soal keadilan, tapi juga kunci memperkuat peran perempuan di ekonomi.

Dalam ranah ketenagakerjaan, analisis gender pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari perspektif pendidikan menyoroti bagaimana perbedaan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan antara laki-laki dan perempuan memengaruhi keterlibatan mereka di pasar kerja. Penelitian Isnaini Husna dan Sulistyanningrum (2020), yang memanfaatkan data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) gelombang 3 hingga 5, menunjukkan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga melatih keterampilan kompetitif di dunia kerja. Estimasi model probit dalam studi itu mengungkap bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang perempuan bergabung dengan angkatan kerja. Secara keseluruhan, pendidikan yang lebih baik membangun keterampilan dan kompetensi, sehingga membuka peluang kerja lebih luas dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.

Budaya

Budaya merupakan salah satu determinan yang turut memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Nilai-nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat sering kali membatasi ruang gerak perempuan, terutama dalam konteks budaya yang masih didominasi oleh sistem patriarki. Dalam struktur tersebut, perempuan umumnya ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada urusan domestik dan pengasuhan anak, sementara laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Pembagian peran ini pada akhirnya dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di luar rumah. Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebenarnya memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga. Keterlibatan tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial seluruh anggota keluarga. Bahkan, semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di luar rumah, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan keluarga yang dapat dicapai (Milyan et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sartika et al., 2024) menunjukkan bahwa budaya patriarki berpengaruh terhadap pembagian kerja rumah tangga, di mana perempuan cenderung memperoleh beban pekerjaan domestik yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Beban tersebut meliputi kegiatan memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anak dan anggota keluarga lainnya, sehingga perempuan memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja maupun mengembangkan keterampilan di

luar rumah. Selain itu, adanya persepsi sosial yang menganggap pekerjaan perempuan hanya sebagai pelengkap penghasilan keluarga semakin memperkuat posisi perempuan dalam ranah domestik. Akibatnya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian finansial serta berkurangnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksetaraan gender secara signifikan memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Analisis regresi linier sederhana menegaskan pengaruh kuat variabel gender terhadap TPAK, dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ dan koefisien determinasi mencapai 17%. Data dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur juga menunjukkan pola yang jelas: partisipasi angkatan kerja pria selalu lebih tinggi daripada wanita. Hal ini mencerminkan berbagai hambatan yang masih dihadapi perempuan dalam memasuki pasar kerja, mulai dari faktor sosial-budaya, pendidikan, hingga keterbatasan akses kesempatan kerja yang setara.

Temuan ini turut memperkaya kajian ekonomi gender dan ketenagakerjaan di tingkat regional, khususnya dengan fokus pada konteks Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan produktivitas ekonomi dan arah pembangunan daerah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, misalnya melalui perluasan akses pendidikan dan pelatihan kerja bagi perempuan, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih responsif terhadap isu gender.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Pendekatan yang digunakan masih bersifat kuantitatif sederhana dengan data sekunder, serta belum memasukkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi TPAK, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, tingkat upah, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Selain itu, cakupan penelitian yang hanya berfokus pada Provinsi Jawa Timur membuat hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara nasional. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti regresi multivariat atau metode campuran (mixed methods), serta memperluas wilayah studi agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara ketidaksetaraan gender dan partisipasi angkatan kerja di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arodha, D., Panorama, M., & Syawaludin, M. (2025). *Muslim women-led agriculture: Strengthen families and climate for SDGs in East Java, Indonesia*. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 45–58. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/12529>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2025*. Badan Pusat Statistik. Diakses pada 8 Mei 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

- Buchori, I., Zaki, A., Pangi, P., & Sejati, A. W. (2024). Garment industry-led urbanization and women workers: Factory-and home-based work in Indonesia. *International Review of Sociology*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/03906701.2024.2366348>
- Colonna, T., Arpornsilp, R., & Riesco, I. L. (2025). Empowering women in Southeast Asia's small-scale wood processing sector: The practitioners' perspective. *Forest Policy and Economics*, 172, 103456. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103456>
- Dwipayanti, N. M. U., Kurnianingsih, I. D. K. D. S., Mustafa, A., Fisher, M. B., & Willetts, J. (2025). Socio-ecological barriers to women's empowerment in sanitation in Eastern Indonesia. *Health & Place*, 92, 103401. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103401>
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D., Eriyanti, L. D., & Farida, I. (2026). Evolving research trends in gender equality across predominantly Muslim nations: A Scopus-based analysis. *Hawwa*, 24(1-2), 190-214. https://brill.com/view/journals/haww/24/1-2/article-p190_7.xml
- Hanoum, F. K., & Imelda, J. D. (2025). The social security for female workers in Indonesia: A gender equality perspective. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Child Protection*, 3(1), 12-25. <https://www.journal-iassf.com/index.php/JGEDSIC/article/view/1156>
- Hariato, S., & Listyani, R. H. (2025). Empowering marginalised women in rural Indonesia: A multifaceted approach. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 45(9-10), 959-975. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-2025-0145>
- Haryani, E., Mustafa Sarinanto, M., Nawawi, Nurhayati, R., Ismed, K., Rajagukguk, Z., Ngadi, Asriyati, E., Ayu Rahmawati, K., Asiati, D., Ahmad Zaelany, A., Teguh Gunawan, B., Lilin Suryono, I., Triyono, Hennigusnia, Kurniawati, A., Chahyadi, H., Effendi, A., Ersandi, N., Subandi. (2023). RENCANA TENAGA KERJA JANGKA PANJANG: MENUJU INDONESIA EMAS 2045.
- Isnaini Husna, R., & Sulistyanningrum, E. (2020). Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia. *Repository UGM*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191068>
- Lestari, U. (2023). The PENGARUH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN GENDER DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022. *COR: Journal of Regional Economics*, 2019. <https://journal3.uinalaudin.ac.id/index.php/icor/article/view/421199/19256>
- Milyan, Idaman, & Ode Sahili, L. (2021). ANALISIS SOSIAL BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 03(01), 147-157.
- Nursyamsiah, T., Arshad, M. N. M., & Idris, Z. Z. (2025). What drives female labour force participation in Indonesia? A systematic literaturereview. *e-BANGI Journal*, 22(2), 115-130. <http://irep.iium.edu.my/125145/>
- Pranita, D., Musthofa, B. M., Kusumastuti, H., & Rahmawati, D. (2025). Transforming vocational higher education on the path toward Golden Indonesia 2045. *Vocation, Technology & Education Journal*, 7(2), 88-101. <https://www.hksmp.com/journals/vte/article/view/806>
- Program Kesetaraan Gender di Ilmu Indonesia. Pemerintahan, (2025). 20(1), 68-79. WORLD BANK GROUP. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/gender-equality-for-growth-research-and-analytical-program-in-indonesia>
- Sartika, D., Waty, E. R. K., Nurizalia, M., Ananda, Y., Masyiroh, U., & Junirahmawati, N. (2024). Pengaruh Faktor Budaya Patriarki pada Pembagian Kerja Rumah Tangga: Studi Kasus Desa

- Buluh Cawang, Ogan Komerling Ilir. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.362>
- Septiani, P., Zidan, M., & Dinar. (2023). Implementasi Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga Masyarakat Kp.Calung-Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1, 1-8. <http://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF>
- Sidabutar, A. F. (2024). ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)PEREMPUAN DI INDONESIA. Purwokerto: Repository Unsoed.
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Tazkianida, R. F. (2025). The contribution of empowered women programs in promoting gender equality for sustainable development goals. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*, 4(1), 55-67. <https://journal-iasssf.com/index.php/SEESDGI/article/view/1116>